

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. Hal ini merupakan suatu sinyal bahwa telah berkembangnya kehidupan berdemokrasi dalam suatu Negara, karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Salah satu alternatif untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik adalah dengan melalui otonomi daerah.

Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efektivitas.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 1999, tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek dalam administrasi keuangan yang dikelola sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Keuangan daerah sangat penting dalam membangun perekonomian daerah, yang bersumber dari pendapatan dan penerimaan daerah yang menjadi kekayaan daerah selama belum dimiliki/dikuasai oleh negara. Keuangan inilah yang menjadi salah satu dasar dalam setiap penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Menurut Halim (2012:20), Keuangan daerah yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Mahmudi (2016:2)

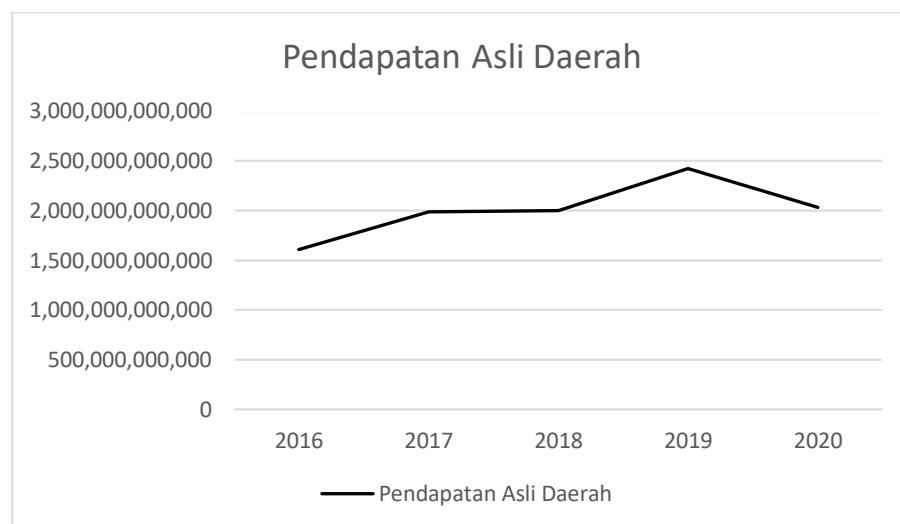
Menyatakan bahwa salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, yang berarti bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya.

Administrasi keuangan daerah dengan melakukan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik akan memberikan manfaat pada efektivitas pelayanan publik yaitu dengan memberikan pelayanan yang tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, mengalokasikan belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik. Karena pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah.

Pemerintah Kota Bekasi yang menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan dengan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014, dan menggunakan sistem akuntansi akrual pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019, dimana sistem akuntansi tersebut digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. dan pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Bekasi menggunakan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum (BLUD). Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yaitu melihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keuangan daerah Pemerintah Kota Bekasi pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami defisit pada tahun anggaran 2020. Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 yang negatif dipicu terjadinya pandemi covid-19, defisit ini merupakan selisih antara pendapatan asli daerah tahun 2020 dibandingkan oleh tahun sebelumnya.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bekasi dapat dilihat juga pada grafik dibawah ini :



Sumber : Kementerian Keuangan

**Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi tahun 2010-2020**

Dari data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Dari data Pendapatan Asli Daerah tersebut menunjukkan pada tahun 2016 merupakan Pendapatan Asli Daerah

terendah yaitu sebesar Rp. 1.607.393.559.507. Tahun 2017 terjadi kenaikan yaitu sebesar Rp. 1.988.356.922.193. Kemudian tahun 2018 terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp. 2.001.150.459.494. Kemudian tahun 2019 terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2.442.151.873.746. Kemudian tahun 2020 terjadi penurunan yaitu sebesar Rp. 2.032.801.192.763.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisiensi, dan ekonomis. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki kelembagaan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2020”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi pada tahun 2010-2020?
2. Bagaimana efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi pada tahun 2010-2020?
3. Bagaimana kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi pada tahun 2010-2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi pada tahun 2010-2020
2. Untuk mengetahui efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi pada tahun 2010-2020
3. Untuk mengetahui kemandirian keuangan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2010-2020

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Bagi peneliti

Untuk mengembangkan akuntansi sektrot publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi dengan mengakses *website* Kementerian Keuangan wilayah Kota Bekasi.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penelitian ini mampu menyelesaikan dengan matriks yang dibuat oleh peneliti dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2010- 2020”

**Tabel 1.1 Matriks Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No.	Kegiatan	Tahun 2021																	
		Maret		April				Mei				Juni				Juli			
		4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan administrasi	■	■																
2	Pengajuan judul	■	■	■															
3	Pembuatan proposal usulan penelitian				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Pendaftaran sidang usulan penelitian													■					
5	Sidang usulan penelitian													■					
6	Revisi usulan Penelitian															■	■	■	■



